

ANALISIS PENGETAHUAN, SIKAP, KETERAMPILAN TEKNIK POLITIK PRAKTIS PEREMPUAN BELU DI KABUPATEN BELU

Emiliana Manek

Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana

email: ekaadja@gmail.com

Abstrak: Analisis Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Teknik Politik Praktis Perempuan Belu di Kabupaten Belu. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan keterampilan Politik Perempuan Belu, hambatan partisipasi politik perempuan dan upaya peningkatan partisipasi politik perempuan Belu. Aspek-aspek yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jadwal penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan Belu di dunia politik dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya perempuan dalam hal ini pengetahuan, sikap dan keterampilan teknik politik praktis yang dimiliki perempuan Belu. Faktor eksternal yaitu hambatan politis dan kelembagaan, hambatan budaya patriarki, hambatan sosial-ekonomi, dan lain sebagainya.

Kata kunci: keterampilan, pengetahuan, perempuan, politik, sikap

Abstract: The Analysis of Knowledge, Attitude, and Practical Political Technique of Women in Belu. This study was aimed at determining the knowledge, attitudes, and skills of women in Belu, barriers to women's political participation and efforts to increase women's political participation in Belu. The aspects used in this research method are the type of research, the research approach, research setting, research schedule, the subject of research, data collection techniques, data analysis techniques, and data validity. The results show that the low participation of women in politics Belu was influenced by the internal and external factors. The internal factor is the poor quality of women's resources in terms of knowledge, attitude and skills of practical political technique. While the external factors include: political and institutional barriers, cultural barriers patriarchy, socio-economic barriers, and so forth.

Keywords: attitude, skill, knowledge, politic, women

PENDAHULUAN

Berbagai regulasi politik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan politik, terutama hak politik perempuan. Hak politik yang dimaksud adalah bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dari hasil pembangunan. Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan partisipasi yang sama dalam proses pembangunan termasuk pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama terhadap sumber daya pembangunan,

serta memperoleh manfaat yang sama tentang Pemilihan Umum.

Pada Pasal 65 ayat (1) UU tersebut ditegaskan bahwa "*Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangnya 30%*". Kebijakan ini memang belum bersifat tetap, akan tetapi setidaknya membawa angin segar bagi perempuan untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan partisipasinya di dunia politik.

Hadirnya perempuan di legislatif akan memfasilitasi aspirasi perempuan karena ketiadaan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan berkorelasi terhadap rumitnya menyalurkan aspirasi perempuan. Perempuan dan laki-laki mempunyai kepentingan yang berbeda, karenanya laki-laki tidak bisa mewakili perempuan seolah laki-laki tahu tentang kebutuhan dan kepentingan perempuan. Hal ini diperlukan suatu usaha dan kerja keras, perempuan dituntut untuk berkiprah dalam organisasi kemasyarakatan, perempuan harus banyak aktif di partai politik dan menjadi pengambil keputusan dan kesemuanya harus didukung oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik yang dimiliki oleh perempuan.

Data menunjukkan bahwa pada hasil Pemilu 2009 perolehan kursi legislatif perempuan Kabupaten Belu sebanyak 7 orang dari 35 kursi. Itu berarti 20% anggota DPRD adalah perempuan dan 80% anggota laki-laki. Kondisi ini merupakan suatu bukti masih rendahnya jumlah perempuan di legislatif. Dari 7 orang tersebut pendidikan tertinggi yang dimiliki yaitu berada pada tingkatan SLTA. Hal tersebut terkesan bahwa perempuan Belu belum atau tidak memiliki kesiapan

dari aspek pengetahuan yang terdiri atas pendidikan dan pengalaman, sikap politik dan keterampilan politik, sementara tuntutan undang-undang sudah mendesak untuk mencapai 30% keterwakilan jumlah perempuan, suatu angka yang harus diteliti agar mendapatkan jawaban, mengapa tidak tercapainya angka 30% keterwakilan perempuan yang membias pada gender.

Pendidikan merupakan syarat utama pembangunan manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang, akan semakin besar potensi dalam pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya di bidang politik. Dianalisis bahwa faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan di ranah politik yang dijadikan sebagai alasan yang sangat rasional adalah karena alasan faktor eksternal yaitu hambatan politis kelembagaan, sosial-ekonomi, budaya patriarki, dan sebagainya. Faktor internal yaitu sumber daya perempuan yang terdiri atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan perempuan. Asumsi tersebut mendorong penulis untuk mengkajinya lewat suatu penelitian ilmiah dengan judul: "*Analisis Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Teknik Politik Praktis Perempuan Belu Sebagai Wujud Partisipasinya Dalam Dunia Politik (Studi Kasus) di Kabupaten Belu*".

Masalah dalam penelitian ini adalah: "*Bagaimanakah Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Politik Perempuan Belu? Dari masalah pokok tersebut di atas, penulis mencoba menitikberatkan penelitian ini pada upaya untuk menjawab sub-sub masalah sebagai berikut: (1) Sejauhmana pengetahuan perempuan Belu tentang politik? (2) Bagaimana sikap perempuan Belu sebagai wujud partisipasinya dalam dunia politik? (3) Bagaimana keterampilan teknik politik praktis perempuan sebagai wujud partisipasinya di dunia politik?*

(4) Apa yang menjadi hambatan dalam peningkatan partisipasi perempuan Belu dalam dunia politik? dan (5) Bagaimana upaya peningkatan partisipasi perempuan Belu dalam dunia politik? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan, sikap politik, keterampilan politik, hambatan-hambatan partisipasi politik, dan upaya-upaya peningkatan partisipasi politik perempuan Belu.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Moleong, 2000 : 3). Penelitian dilakukan di Kabupaten Belu dan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, dimulai dari bulan Februari 2014 sampai dengan Juni 2014. Penentuan sampel didasarkan pada Teknik *Snowball Sampling*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari anggota DPRD perempuan terpilih periode 2009-2014 sebagai informan kunci, calon legislatif perempuan, ketua DPRD Kabupaten Belu, partai politik, tokoh-tokoh politik, masyarakat, adat, agama.

Pengumpulan data menggunakan sumber primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan (tiga) alat bantu yaitu: wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992: 20). Ada 4 komponen yang dilakukan dengan model ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan-temuan penelitian berdasarkan proses triangulasi terkait pengetahuan, sikap, dan keterampilan

teknik politik praktis perempuan Belu dan partisipasinya di dunia politik. Hasilnya dianalisis dan diinterpretasi dalam perspektif perbandingan teori-teori dan proses reflektif hasil dialektika antara temuan di lapangan dengan refleksi kritis. Proses analisis ini merujuk pada tingkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan teknik politik praktis perempuan Belu dan partisipasi dalam dunia politik yang merujuk pada beberapa karakter yang dimiliki oleh perempuan Belu yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengetahuan Perempuan Belu dalam Dunia Politik

Pengetahuan dalam hal ini pendidikan yang dimiliki oleh anggota perempuan DPRD Kabupaten Belu lima tahun terakhir dari berbagai fraksi menunjukkan kondisi masih rendah. Data Profil Anggota DPRD Kabupaten Periode 2009-2014, yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Kabupaten Belu menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perempuan rata-rata berada pada tingkat SLTA. Dari 7 orang yang ada, 2 orang berpendidikan D3. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan Belu masih dikategorikan rendah.

Rendahnya pendidikan dan pengetahuan berpengaruh terhadap representasi perempuan baik dari segi kualitas maupun kuantitas di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu. Untuk dapat menyimpulkan bagaimana tingkat pengetahuan (pendidikan dan pengalaman perempuan Belu), penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan dan ditunjang dengan data yang ada menunjukkan bahwa anggota perempuan DPRD Kabupaten Belu hanya sedikit orang yang cukup vokal dan sangat antusias dalam memberikan tanggapan serta berargumen secara logis dalam setiap

rapat dewan, sedangkan selebihnya hanya ikut menghadiri sidang tanpa banyak memberikan kontribusi yang lebih.

Kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh perempuan akan sangat membantu membangun solusi atas peta konflik, kepentingan publik, dan strategi komunikasi politik yang hendak dibangun. Inilah yang belum dimiliki oleh perempuan Belu. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan partisipasi perempuan Belu dalam seluruh aktivitas politik sehingga dapat mempengaruhi kemampuan, keterampilan, loyalitas, dan dedikasinya dalam menjalankan amanat rakyat.

Sikap Politik Perempuan Belu

Hasil wawancara di atas menunjukkan sikap politik baik kesediaan, komitmen, independensi, dan integritas perempuan Belu untuk terlibat aktif dalam dunia politik terhambat oleh faktor budaya patriarki yang membatasi ruang perempuan, yang cenderung sibuk dengan peran domestik dan rutinitasnya dalam rumah tangga membuat perempuan enggan menyisihkan waktu, tenaga, dan dana untuk kegiatan-kegiatan politik. Hal ini didukung pula oleh hasil observasi pada rutinitas perempuan dalam keluarga yang waktunya lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan mengurus rumah tangga, dan belum siap meninggalkan tugas pokoknya yang mulia sebagai isteri bagi suami dan ibu bagi anak-anak.

Sebagian anggota DPRD perempuan setelah terpilih menjadi anggota dewan, ketika melaksanakan tugas pokoknya, masih dihadapkan oleh kesulitan membagi waktu, sehingga masih ada juga yang tidak disiplin. Kondisi ini diperkuat dengan data dalam bentuk dokumen Risalah Sidang I sampai dengan Risalah Sidang III Tahun 2013 DPRD Kabupaten Belu. Pada Rapat Paripurna 1 sampai dengan 11 masih terdapat perempuan yang

absen dalam rapat tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan belum siap menyediakan waktu secara utuh untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai anggota legislatif.

Keterampilan Politik

Berdasarkan hasil wawancara dan didukung pula oleh temuan dalam dokumen berupa memo atau instruksi yang diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Belu kepada anggota DPRD terlihat bahwa dari 7 orang perempuan, sebagian besar memiliki keterampilan politik yang masih jauh dari harapan masyarakat. Setidaknya perempuan legislatif mampu memperkuat dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas melalui pembentukan dan penguatan jaringan kerja serta peningkatan keterampilan politik, namun itu belum tampak. Meskipun telah mengalami peningkatan secara kuantitas, belakangan muncul pertanyaan: "Apakah representasi perempuan di parlemen benar-benar merupakan pencapaian secara substantif yang mampu menyuarakan aspirasi kepentingan masyarakat kecil dan kebutuhan perempuan atau hanya bersifat simbolik dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban angka 30% representasi perempuan?".

Pertanyaan ini muncul karena tidak banyak perempuan anggota DPRD yang dikenal publik maupun mampu menyuarakan aspirasi masyarakat. Hal ini didukung pula oleh informasi yang diperoleh dari informan yang memberikan kritikan atas kurangnya suara perempuan parlemen dalam mewarnai proses legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran. Mereka meragukan kapasitas perempuan anggota legislatif mengeluarkan pernyataan bahwa kuantitas tidak penting. Yang diperlukan adalah kapasitas dan keterampilan melihat permasalahan di

berbagai sektor. Masyarakat belum merasakan dampak signifikan dengan meningkatnya jumlah perempuan di DPRD. Setidaknya suara perempuan di parlemen harus banyak mewarnai DPRD. Pada akhirnya disadari bahwa penting secara paralel meningkatkan kualitas dan keterampilan politik perempuan melalui berbagai intervensi kebijakan dan program, sehingga keberadaan perempuan di jabatan-jabatan publik bisa membawa aspirasi dan suara perempuan yang selama ini dimarginalkan.

Hambatan Partisipasi Politik Perempuan

Hambatan Politis dan Kelembagaan

Salah satu hambatan rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia politik terutama keterwakilan perempuan di legislatif, dipengaruhi oleh hambatan politis dan kelembagaan. Sebagaimana diketahui, partai politik memainkan peranan penting dalam mempengaruhi jumlah perempuan yang terpilih masuk ke lembaga DPRD, tetapi kenyataannya organisasi-organisasi ini (partai politik) belum menunjukkan komitmen yang kuat dan rumusan kebijakan yang tegas mengenai kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki mulai misalnya bagaimana upaya pengaderan bagi perempuan dan sistem rekrutmen calon yang membuka peluang besar bagi perempuan untuk lolos.

Menarik untuk dicermati, beberapa nama calon legislatif perempuan periode 2014-2019 ketika mencalonkan diri tidak didasarkan pada kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya melainkan karena memiliki hubungan geneologis dengan pengurus inti parpol baik sebagai suami, anak ataupun kerabat dekat, sehingga ia dapat lolos. Naiknya perempuan ke tampuk kekuasaan politik dan kemampuan mempertahankannya

hampir-hampir tidak dapat dilepaskan dari figur laki-laki, baik ayah maupun suami. Artinya, figur laki-laki merupakan faktor penting untuk menggugah emosi dan memperkuat basis dukungan massa. Seberapa banyak dukungan massa yang diperoleh oleh politikus perempuan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga siapa yang berada di balik perempuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Belu pada umumnya belum memiliki kemandirian dan independensi dalam berkarya di dunia politik.

Hambatan Sosial-Ekonomi

Data yang diperoleh menggambarkan keterwakilan perempuan di ranah politik harus didukung pula oleh faktor sosial ekonomi perempuan yang harus memiliki kekuatan secara finansial serta dukungan sosial yang kuat dari keluarga, kelompok kepentingan tertentu, dan massa pendukungnya. Hal ini diperkuat pula oleh hasil pengamatan bahwa hampir sebagian calon legislatif perempuan yang gagal adalah yang belum siap secara sosial dan material (dukungan massa dan keuangan). Mereka yang lolos adalah mereka yang kuat secara ekonomi, sehingga tampak jelas bahwa salah satu kendala perempuan untuk terjun di dunia politik yaitu karena keterbatasan dana dan akses baik ekonomi maupun sosial.

Perempuan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pemilu. Ideologi yang dianut masyarakat yang menomorsatukan laki-laki membuat perempuan terpojok secara sosial dan secara ekonomi. Sedikit sekali sumber daya yang diinvestasikan pada perempuan sebagai sebuah modal (*human capital*) baik oleh keluarga maupun negara. Perempuan yang tidak memiliki daya secara finansial, memiliki kekurangan dalam hal kekuasaan sosial maupun ekonomi semakin sulit untuk masuk ke ranah politik yang amat di

dominasi oleh kaum laki-laki. Status sosial ekonomi perempuan di dalam masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap partisipasi mereka dalam institusi politik.

Hambatan Pribadi-Psikologis

Perempuan Belu sebenarnya memiliki kemampuan dan potensi yang cukup besar namun kesadaran politik yang dimiliki oleh perempuan masih sangat rendah. Hambatan itu sebenarnya datang dari perempuan itu sendiri yang tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk melangkah ke dunia politik. Masih melekatnya pemahaman tradisional dalam diri perempuan bahwa politik itu adalah dunia laki-laki, politik itu kotor, penuh persaingan, dan bertentangan dengan citra seorang perempuan. Inilah yang menjadi hambatan perempuan tidak berani untuk terjun dalam dunia politik.

Kendala utama perempuan Belu untuk terjun di dalam dunia politik yaitu kendala waktu, yang belum secara total menyediakan waktu mengikuti seluruh aktivitas dan kegiatan politik, sehingga pengalaman organisasinya pun rendah. Sedangkan salah satu tuntutan untuk lolos yaitu paling kurang memiliki pengalaman yang cukup di partai politiknya.

Sebenarnya hambatan terbesar dari perempuan itu sendiri adalah bahwa ternyata perempuan tidak punya komitmen dan tekad yang kuat untuk terus berkiprah di dunia politik. Kurangnya pengetahuan politik perempuan mempengaruhi pula terhadap upaya memegang teguh komitmen telah disepakati sebelumnya mulai dari komitmen pribadi, komitmen partai dan komitmen dengan masyarakat pendukungnya. Perempuan kurang memiliki prinsip yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi kaumnya. Sementara waktu kaum perempuan di legislatif harus berhadapan dengan anggota legislatif laki-laki. Ada

kecenderungan untuk mengalah ketika ada perdebatan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Rendahnya kesadaran politik, kurang rasa percaya, dan masih melekatnya pemahaman dalam diri perempuan bahwa dunia politik adalah dunia yang penuh persaingan yang tidak sehat, penuh kekerasan (intrik), dan penuh resiko membuat perempuan enggan untuk terjun di dunia politik.

Hambatan Budaya Patriarki

Kuatnya budaya patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat membuat perempuan merasa terpinggirkan. Budaya patriarki merupakan budaya yang menomorsatukan posisi dan peran laki-laki dan masyarakat Belu bagian utara menganut budaya ini. Budaya ini seolah membatasi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Perempuan dianggap bertugas mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki bekerja di luar rumah. Masih lekat pemahaman akibat pengaruh budaya yang memberikan tradisional dalam diri perempuan bahwa politik itu adalah dunianya laki-laki, politik itu kotor, penuh persaingan, dan itu bertentangan dengan citra seorang perempuan. Inilah yang menjadi hambatan perempuan tidak berani untuk terjun ke dunia politik. Budaya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Belu Utara, yang *nota bene* menganut budaya patrilineal, seolah-olah mengukuhkan ketidakadilan bagi perempuan.

Data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa tokoh-tokoh politik dan tokoh adat di Belu menunjukkan bahwa budaya patriarki mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keterlibatan perempuan di ranah politik. Hal ini diperkuat oleh hasil pengamatan di lapangan bahwa budaya patriarki sangat dominan pengaruhnya terhadap setiap keputusan dan sikap yang

diambil seorang perempuan. Di lain pihak kaum laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik. Kondisi ini yang juga dapat membatasi ruang gerak perempuan dan kesediaannya untuk terlibat aktif di ranah politik.

Masyarakat Kabupaten Belu pada dasarnya menganut dua sistem budaya yaitu budaya patriarki (Belu bagian utara dan matriarki Belu bagian selatan). Sekalipun masyarakat Belu bagian selatan menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (kawin masuk), namun dalam keseharian hidup perempuan Belu bagian selatan juga masih terdapat perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan terhadap perempuan. Inilah yang menjadi masalah yang perlu ditelaah lebih lanjut. Biasanya nilai budaya patriarki merembes pula pada masyarakat yang menganut budaya matriarkat, yang masih menampakkan ketidakadilan dalam masyarakat ini.

Hambatan Sumber Daya Manusia

Rendahnya sumber daya perempuan menjadi salah satu elemen penghambat perubahan perempuan menuju ruang publik. Tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan perempuan menjadi penghambat utama bagi kebangkitan perempuan.

Masalah sumber daya manusia merupakan hambatan terbesar bagi perempuan untuk terlibat di ranah politik. Perempuan belum siap secara kualitas mulai dari pendidikannya, pengalaman organisasi dan keterampilan yang dimiliki perempuan untuk bersaing di dunia politik. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan terutama dalam partisipasi politik itu dipengaruhi juga akibat dari adanya ketidaksetaraan akses atas sumber daya, misalnya akses pendidikan, dan pelatihan keterampilan

yang memungkinkan perempuan bekerja secara produktif. Kekhawatiran yang sama juga dilontarkan pengamat politik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Fajar Timur Belu (Yoseph Manek Bere S.Sos.) yang mengatakan:

Rendahnya sumber daya perempuan Belu, menjadi indikasi umum terhadap rendahnya kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki perempuan. Kualitas yang dimiliki perempuan sangat berpengaruh terhadap profesinya, mengingat begitu kompleksnya persoalan masyarakat yang harus diurus. Kompetensi akan sangat membantu membangun solusi atas peta konflik, kepentingan publik dan strategi komunikasi politik yang hendak dibangun" (Wawancara: tanggal 27-04-2014).

Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Politisi Perempuan Harus Mempunyai Integritas

Berbicara tentang sumber daya manusia berarti juga berbicara soal integritas politisi yaitu mengenai keutuhan diri pelaku politik. Integritas dalam konteks ini bukan hanya soal kualitas kepribadian seseorang melainkan relasi antara kualitas kepribadian tersebut dengan peran yang harus dimainkannya. Sebagai pribadi seseorang bisa sangat baik, namun belum tentu dia baik untuk melaksanakan peran dan tugas tertentu.

Integritas yang dimaksudkan adalah kesepadanan antara kemampuan diri dengan peran yang harus dimainkan seseorang. Bukan sesuatu yang muluk-muluk, selain prinsip sendi-sendii peraturan hukum secara khusus berkaitan dengan peran seorang politisi. Integritas seorang politisi ditentukan oleh posisinya sebagai wakil rakyat yang mewakili kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan. Seorang politisi yang berkualitas adalah seseorang

yang sungguh merakyat, memahami pikiran dan perasaan rakyat.

Kepekaan hati budi sangat penting dan menjadi syarat bahwa seorang politisi agar dapat dipercaya oleh masyarakat. maksudnya, pola hidupnya tidak demikian mencolok atau kaya mendadak sehingga menimbulkan kecurigaan bagi rakyat. Selain itu, secara sangat sederhana dapat dikatakan bahwa seorang yang berkualitas adalah seorang yang berkompotensi, berkomitmen, melaksanakan perannya, dan hidup sebagai wakil rakyat. Rakyat atau masyarakat harus menjadi titik tolak dan rujukannya.

Militansi Politisi Perempuan: Kualitas Diri

Keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik semakin mencuat. Kaum perempuan sudah diberi tawaran dan peluang untuk menduduki kursi jabatan publik. Merujuk pada peluang dan kiprah perempuan dalam dunia politik, penulis memberi catatan bagi kaum perempuan. Pada prinsipnya, dunia politik menjadi berkualitas ketika para politisi memiliki kualitas diri. Seperangkat hukum dan peraturan perundang-undangan dalam dunia politik hanyalah sebuah instrumen lembaga politik.

Kualitas diri perempuan yang terjun di dunia politik digambarkan seperti berikut. *Pertama*, seorang politisi perempuan mestilah pribadi yang memiliki kualitas diri intelektual yang baik agar dapat membaca permasalahan dan potensi yang ada untuk mengatasi masalah. Kualitas intelektual bukan pertama-tama soal ijazah, melainkan kesanggupan untuk menggunakan pikiran untuk berpikir secara logis.

Kedua, seorang politisi perempuan adalah pribadi yang matang secara emosional. Artinya, mengetahui cara mengendalikan perasaannya orang lain.

Perempuan yang mudah tersinggung, yang cepat menanggapi segala kritik sebagai perlawanan terhadap dirinya, tidak akan menjadi politisi yang baik, karena menjadi politisi adalah menjadi figur publik.

Ketiga, seorang politisi yang baik perlu membina keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan. Hidup spiritualnya bukan terletak pada sejumlah kehadiran dalam kegiatan ritual keagamaan tetapi lebih pada penghayatan konkret imannya. Ketidakseimbangan hidup dan iman dan tugasnya adalah bentuk penghinaan terhadap Tuhan.

Keempat, seorang politisi perempuan mestilah seorang yang tahu bergaul dengan masyarakat dan mampu membaca situasi masyarakatnya. Harus peka terhadap masyarakat dan mampu memberi solusi atas isu-isu kemanusiaan.

Kelima, seorang politisi perempuan yang baik harus mempunyai kehidupan moral yang baik dan ketahanan moral yang dapat diandalkan. Moralitas adalah modal dasar yang tidak yang tidak pernah boleh berkurang. Skandal yang dibuatnya akan menjadi musuh dari sebuah kepercayaan masyarakat.

Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming)

Oedjoe (2010: 55) menjelaskan Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG): (a) membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender; (b) memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi, sebagai dampak dari bias gender; dan (c) meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing.

Pemberdayaan Perempuan

Upaya-upaya pemberdayaan perempuan adalah: (1) menyusun, mengkaji, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan pembangunan dan pedoman agar responsif dan sensitif gender terhadap kebutuhan perempuan; (2) mensosialisasikan dan advokasi kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan perlindungan terhadap segala bentuk ketidakadilan kepada *stake holders* di pusat dan daerah; (3) mengembangkan model pemberdayaan perempuan melalui program pengentasan kemiskinan dengan fokus pada perempuan miskin di pedesaan; (4) menggerakkan potensi dunia usaha, swasta dan masyarakat melalui koordinasi dan kemitraan agar perempuan miskin dapat mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial; (5) koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam melakukan berbagai kampanye dan pelatihan kecakapan hidup (*life skill*) bagi perempuan secara komprehensif dan terpadu; (6) meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pendampingan dan pemberdayaan perempuan terutama pada kelompok marginal; dan (7) memfasilitasi dan penguatan kelompok-kelompok perempuan sebagai pendamping dan penggerak masyarakat, *agent of change, prime mover* dalam peningkatan kesehatan, pendidikan dan ekonomi bagi perempuan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut. (1) Pengetahuan, dalam hal ini pendidikan dan pengalaman politik, yang dimiliki oleh perempuan Belu terutama yang duduk di lembaga legislatif masih rendah. Kurang terlibatnya perempuan Belu dalam kegiatan politik berpengaruh

terhadap pengalaman yang dimilikinya. Dan hal itu berpengaruh pula pada produktivitas dan kinerjanya dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD. (2) Sikap politik perempuan Belu mulai dari sikap kesediaan, komitmen, independensi, hingga integritas masih belum melekat kuat dalam diri perempuan Belu, Hal ini dipengaruhi juga oleh sistem budaya patriarki yang "maskulinitas" yang memosisikan laki-laki sebagai penentu keputusan dalam keluarga, sehingga menyebabkan laki-laki cenderung protektif terhadap perempuan. Dan inilah yang membatasi ruang gerak perempuan. (3) Rendahnya keterampilan politik perempuan Belu mempengaruhi rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. (4) Rendahnya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kabupaten Belu disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuannya mulai dari hambatan kelembagaan dan partai politik, hambatan pribadi/pskologis, hambatan sumber daya manusia, hambatan budaya patriarki, hambatan sosial-ekonomi, dan hambatan lainnya. (5) Berbagai upaya dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi politik perempuan yaitu meningkatkan kesadaran akan integritas dan kualitas diri perempuan itu sendiri, peningkatan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya.

Bertolak dari simpulan yang ada, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut. (1) Perlunya peningkatan peran dan upaya yang serius dan tegas secara bersama oleh berbagai kelompok kepentingan misalnya Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Pendidikan, Masyarakat, Organisasi Nonpemerintah lainnya dalam meningkatkan partisipasi politik

perempuan. (2) Perlunya peningkatan kesadaran perempuan, rasa percaya diri, dan komitmen bagi perempuan untuk lebih berpartisipasi aktif di dunia politik. (3) Perlunya peningkatan pendidikan dan kesadaran laki-laki dan perempuan dalam memahami tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sehingga terbuka luas kesempatan bagi perempuan untuk duduk di posisi strategis di level pengambilan kebijakan atau keputusan. (4) Perempuan di parlemen harus merebut ruang-ruang strategis dan setelah itu berkomitmen untuk selalu memperjuangkan isu perempuan di parlemen (anggaran), mendorong kebijakan perlindungan perempuan dan implementasi kebijakannya, dan peningkatan pengetahuan dan strategi kepada perempuan parlemen. (5) Para calon legislatif diharapkan perlu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknik politik praktis melalui pelatihan dalam masa kampanye demi memastikan

calon legislatif tersebut mengetahui seluk beluk kepemiluan, terlatih dalam mengawasi pemilu, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 1992. *Analisa Data Kualitas Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. (Terj.: Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oedjoe, M.R. 2010. *Modul: Panduan Merancang Bahan Ajar Yang Adil dan Setara Bagi Anak Perempuan dan Laki-Laki*. Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*